

P D R B

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
MENURUT PENGELUARAN

2014 - 2018

<https://kepsulkab.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KEPULAUAN SULA



P D R B

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
MENURUT PENGELUARAN

2014 - 2018



PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

KABUPATEN KEPULAUAN SULA

MENURUT PENGELUARAN 2014-2018

ISSN/ ISBN : -
No. Publikasi : 82030.1905
Katalog : 9302020.8203

Ukuran Buku : 21 cm X 29,7 cm
Jumlah Halaman : xiii + 86 halaman

Naskah:

Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Desain Kover oleh:

Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Penerbit:

BPS Kabupaten Kepulauan Sula

Pencetak:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sula

Sumber Ilustrasi: -

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

TIM PENYUSUN

Penanggungjawab Umum:

Ahmad Abdurrahman, SST

Penyunting:

Mochammad Alwan, S.Tr.Stat

Penulis:

Endang Maulani Umaternate, SST

Pengolah Data:

Endang Maulani Umaternate, SST

Gambar Kulit:

Seksi IPDS BPS Kabupaten Kepulauan Sula

KATA PENGANTAR

Publikasi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kepulauan Sula Menurut Pengeluaran 2014-2018 merupakan kelanjutan dari penerbitan publikasi tahun-tahun sebelumnya yang disusun oleh BPS Kabupaten Kepulauan Sula. Angka PDRB dalam publikasi ini menggunakan PDRB dengan tahun dasar 2010 dengan penyempurnaan metodologi serta ruang lingkup dengan mengacu pada *System National Accounts 2008* (SNA 2008).

Publikasi ini menyajikan gambaran perekonomian Kabupaten Kepulauan Sula secara deskriptif selama kurun waktu 2014-2018 melalui pendekatan pengeluaran dalam bentuk konsumsi, investasi, maupun ekspor impor. Dalam publikasi ini disajikan berbagai jenis tabel PDRB tahun 2014–2018 atas dasar harga berlaku dan harga konstan 2010 dalam bentuk nilai nominal dan persentase. Perlu diketahui bahwa angka PDRB tahun 2017 yang disajikan bersifat sementara sedangkan tahun 2018 bersifat sangat sementara.

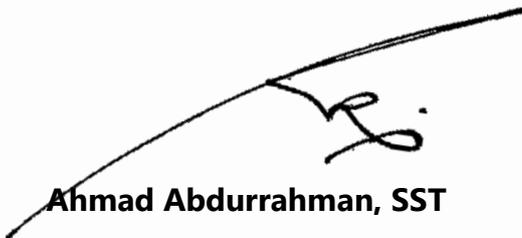
Pada kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sula sehingga memungkinkan terbitnya buku ini. Kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi penyempurnaan penyusunan publikasi mendatang.

Terimakasih.

Sanana Utara, Agustus 2019

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KEPULAUAN SULA

KEPALA,



Ahmad Abdurrahman, SST

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
I PENDAHULUAN	1
1.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	3
1.2 Perubahan Tahun Dasar Produk Domestik Regional Bruto.....	7
II METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA	13
2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga.....	15
2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga	18
2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah	21
2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto.....	25
2.5 Perubahan Inventori	28
2.6 Ekspor Impor	32
III TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN KEPULAUAN SULA	35
3.1 Perkembangan PDRB Pengeluaran.....	37
3.2 Perkembangan PDRB Pengeluaran.....	47
3.2.1 Konsumsi Akhir Rumah Tangga	47
3.2.2 Konsumsi Akhir LNPRT	51
3.2.3 Konsumsi Akhir Pemerintah.....	53
3.2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto.....	55
3.2.5 Perubahan Inventori	57

3.2.6 Ekspor.....	58
3.2.7 Impor.....	60

IV PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB PENGELUARAN KABUPATEN KEPULAUAN

SULA.....	63
------------------	-----------

4.1 PDRB.....	65
---------------	----

4.2 Proporsi Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB	66
---	----

4.3 Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	68
---	----

V PENUTUP.....	71
-----------------------	-----------

VI LAMPIRAN

VII DAFTAR PUSTAKA

<https://kepsulkab.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

	Halaman/ Page	
Tabel 1.1	Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010	12
Tabel 3.1	PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Kepulauan Sula 2014-2018	38
Tabel 3.2	PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Kepulauan Sula 2014-2018	40
Tabel 3.3	Distribusi PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten/Kota Kepulauan Sula 2014-2018	42
Tabel 3.4	Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran, Kabupaten Kepulauan Sula 2014-2018	44
Tabel 3.5	Pertumbuhan Indeks Implisit PDRB Pengeluaran, Kabupaten Kepulauan Sula 2014-2018	45
Tabel 3.6	Perkembangan Komponen Konsumsi Rumahtangga Kabupaten Kepulauan Sula 2014-2018	48
Tabel 3.7	Struktur Komponen Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Kepulauan Sula 2014-2018	50
Tabel 3.8	Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Kepulauan Sula 2014-2018	51
Tabel 3.9	Perkembangan Pengeluaran Akhir Konsumsi LNPRT Kabupaten Kepulauan Sula 2014-2018	52
Tabel 3.10	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula 2014-2018	54
Tabel 3.11	Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Kepulauan Sula 2014-2018	56
Tabel 3.12	Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Kepulauan Sula 2014-2018	57
Tabel 3.13	Perkembangan Ekspor Kabupaten/Kota Kepulauan Sula 2014-2017	59
Tabel 3.14	Perkembangan Impor Kabupaten Kepulauan Sula 2014-2018	61

Tabel 4.1	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Kepulauan Sula 2014–2018	65
Tabel 4.2	Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Sula 2014-2018	66
Tabel 4.3	Incremental Capital Output Ratio, Kabupaten Kepulauan Sula 2014-2018	68

<https://kepsulkab.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

Halaman/ Page

Gambar 3.1 Pertumbuhan PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Kepulauan Sula 2014-2018 43

<https://kepsulkab.bps.go.id>

DAFTAR LAMPIRAN

		Halaman/ Page
Tabel 1	PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2014-2018	78
Tabel 2	PDRB ADHK Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2014-2018	79
Tabel 3	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2014-2018	80
Tabel 4	Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2014-2018	81
Tabel 5	Laju Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2014-2018	82
Tabel 6	Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2014-2018	83

<https://kepsulkab.bps.go.id>

| **BAB I**
PENDAHULUAN

1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran (PDRB Pengeluaran) merupakan salah satu bentuk tampilan data ekonomi suatu wilayah, di samping bentuk tampilan lain seperti PDRB menurut lapangan usaha, Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi, dan Neraca Arus Dana. Di dalam sistem kerangka kerja (*frame work*) data ekonomi suatu wilayah, PDRB Pengeluaran merupakan ukuran dasar (*basic measure*) yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa (*product*) yang dihasilkan melalui aktivitas produksi. Dalam konteks ini, PDRB Pengeluaran itu menggambarkan hasil "akhir" dari proses produksi yang berlangsung dalam batas-batas teritori suatu wilayah. Berbagai jenis barang dan jasa akhir tersebut akan digunakan untuk memenuhi permintaan akhir oleh pelaku ekonomi domestik maupun pelaku ekonomi dari luar wilayah bahkan dari luar negeri. Beberapa agregat penting dapat diturunkan dari PDRB Pengeluaran ini seperti variabel Pengeluaran Konsumsi Akhir, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik, serta ekspor dan impor.

Penghitungan PDRB melalui pendekatan pengeluaran (*expenditure*) tidak terlepas dari penghitungan PDRB melalui pendekatan lapangan usaha (*production*). Sungguhpun demikian, PDRB Pengeluaran diestimasi secara independen dengan menggunakan data dasar yang relatif berbeda. PDRB Produksi menggambarkan aktivitas produksi, serta pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang terlibat (balas jasa faktor produksi)¹. Sedangkan PDRB Pengeluaran menggambarkan aktivitas pengeluaran yang dilakukan para pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi tersebut. Melalui PDRB Pengeluaran juga dapat dilihat keterkaitannya dengan penyediaan barang dan jasa yang berasal dari domestik maupun dari impor. Melalui hubungan ini terlihat titik keseimbangan makro antara sisi penyediaan (*supply side*) dan sisi permintaan (*demand side*) barang dan jasa.

¹ Termasuk di dalamnya penyusutan dan pajak tidak langsung "neto" (pajak tidak langsung dikurangi subsidi)

Secara konsep-konsep penghitungan PDRB dari sisi yang berbeda di atas dimaksudkan untuk: i) memastikan konsistensi dan kelengkapan di dalam membuat estimasi; ii) memberi manfaat lebih di dalam melakukan analisis; dan iii) mengontrol kelayakan hasil estimasi. Secara teoritis, kedua pendekatan tersebut akan menghasilkan nilai yang sama besar (*equivalent*). Namun karena pendekatan estimasi dan metoda pengukuran yang digunakan berbeda, maka akan muncul selisih statistik (*statistical discrepancy*).

Dengan demikian PDRB Pengeluaran menjelaskan besarnya nilai barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan dalam wilayah domestik, yang digunakan sebagai konsumsi "akhir" oleh masyarakat. Secara spesifik, yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan barang dan jasa yang tidak dimaksudkan untuk diproses lebih lanjut (dikonsumsi habis). Penggunaan produk akhir tersebut diwujudkan dalam bentuk "permintaan akhir". Permintaan akhir yang dimaksud terdiri dari komponen-komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumahtangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumahtangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori (PI), serta komponen Ekspor barang dan jasa.

Dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan akhir masyarakat tersebut, tidak terlepas dari ketergantungan pada produk yang berasal dari luar wilayah atau luar negeri (impor). Berbagai barang dan jasa yang menjadi konsumsi akhir masyarakat di dalamnya akan terkandung produk impor. Sehingga dalam mengukur besarnya nilai tambah domestik (PDRB), komponen impor barang dan jasa harus dikeluarkan atau dikurangkan dari penghitungan konsumsi atau permintaan akhir. Tingginya permintaan tidak selalu diimbangi oleh penyediaan domestik, sehingga kondisi ini menjadi peluang bagi masuknya produk impor. Data empiris menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu, perdagangan produk impor terus berkembang baik secara kuantitas, nilai, maupun ragamnya.

Secara konsep, PDRB Produksi (Y) sama besar dengan PDRB Pengeluaran (E), namun dalam kenyataannya tidaklah demikian. Selain berbeda dalam struktur atau komposisi, pendekatan pengukuran antar keduanya juga berbeda. Dalam penyajian data PDRB, perbedaan ini diletakkan pada sisi PDRB Pengeluaran. Unsur yang menyebabkan perbedaan tersebut antara lain adalah konsep dan basis pengukuran, metoda dan cakupan pengukuran, serta data dasar yang digunakan untuk estimasi. Melalui penjelasan ini para pengguna data PDRB tidak memperlakukan adanya perbedaan (*statistical discrepancy*) tersebut.

Penyusunan data **PDRB Pengeluaran** juga dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana “pendapatan” (Y) yang tercipta melalui proses produksi menjadi sumber pendapatan masyarakat², yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir.

Dari sudut pandang lain, PDRB Pengeluaran juga menjelaskan penggunaan dari sebagian besar produk domestik bruto untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir, atau dengan istilah yang berbeda disebut sebagai “**output akhir (final output)**”. Mengkaitkan antara pendapatan dan pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa dari produk domestik maupun impor (termasuk untuk diekspor) merupakan bentuk analisis yang sederhana dari data PDRB. Keharusan memiliki jumlah yang sama pada kedua model pendekatan PDRB tersebut, secara simultan dapat ditunjukkan melalui model atau persamaan *Keynesian* sbb :

$$Y = C + GFCF + \Delta \text{ Inventori} + X - M$$

Y (*Income*)

= PDRB Produksi

3. - Yang dimaksud adalah rumah tangga, pemerintah, lembaga non profit yang melayani rumah tangga serta sektor produksi (produsen) di wilayah domestik
 - Disebut sebagai pendekatan “riil”
 - Siklus ekonomi secara umum yang menjelaskan tentang hubungan antara balas jasa faktor produksi (pendapatan) dengan pengeluaran atas penggunaan berbagai produk barang dan jasa oleh faktor produksi tersebut

C (<i>Consumption</i>)	=	Konsumsi akhir
GFCF (<i>Gross Fixed Capital Formation</i>)	=	Pembentukan Modal Tetap Bruto
Δ Inventori	=	Perubahan Inventori
X	=	Ekspor
M	=	Impor

Persamaan di atas menunjukkan pendapatan atau nilai tambah bruto dari hasil penghitungan PDRB Produksi akan "identik" dengan PDRB Pengeluaran. Jika Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi akhir, dan GFCF serta Δ Inventori merupakan bentuk investasi fisik, maka selisih antara ekspor dengan impor menggambarkan surplus atau defisit dari aktivitas perdagangan barang dan jasa antar wilayah, baik dengan wilayah lain ataupun dengan luar negeri.

Melalui pendekatan ini dapat diketahui perilaku masyarakat dalam menggunakan pendapatan, apakah hanya untuk tujuan konsumsi (akhir) atau juga untuk tujuan investasi (fisik). Selain itu juga dapat diketahui besarnya ketergantungan ekonomi wilayah (domestik) terhadap luar negeri dalam bentuk perdagangan internasional (*external transaction*). Selisih antara ekspor dan impor juga disebut sebagai "ekspor neto".

Sebagaimana PDRB Produksi, dari PDRB Pengeluaran juga dapat diturunkan berbagai data agregat tentang perekonomian wilayah seperti nilai nominal, struktur atau distribusi pengeluaran konsumsi akhir, pertumbuhan "riil", serta indeks harga implisit. Data yang dimaksud tersedia baik untuk masing-masing komponen PDRB Pengeluaran maupun untuk total perekonomian.

1.2 PERUBAHAN TAHUN DASAR PDRB

Mengapa Tahun Dasar PDRB Perlu Diubah?

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada kondisi perekonomian global maupun lokal, yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional, serta semakin meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan beberapa contoh perubahan yang perlu diantisipasi dalam mekanisme pencatatan data statistik nasional.

Satu bentuk implementasi dari *System of National Accounts (SNA)* adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB/PDRB. Di Indonesia kegiatan perubahan tahun dasar dari tahun 2000 ke 2010 dilakukan bersamaan dengan upaya mengimplementasi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam buku panduan SNA 2008. Kegiatan ini diawali dengan menyusun kerangka kerja dalam bentuk *Supply and Use Tables (SUT)* Indonesia untuk tahun data 2010. Dari kerangka SUT tersebut diperoleh nilai estimasi PDB dan komponen-komponennya. Selanjutnya nilai PDB maupun komponennya ini dijadikan sebagai acuan (*benchmark*) ketika BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten/Kota menyusun PDRB-nya. Untuk itu, guna menjaga konsistensi dengan hasil penghitungan PDB, maka perubahan tahun dasar PDRB dilakukan secara simultan dengan perubahan tahun dasar PDB.

Apa yang Dimaksud dengan SNA 2008?

SNA 2008 merupakan rekomendasi internasional tentang tata cara pengukuran aktivitas ekonomi, yang telah sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, cakupan, dan klasifikasi, serta aturan

neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator ekonomi makro (*account*) seperti PDB/PDRB.

SNA dirancang guna menyediakan informasi tentang aktivitas yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi, utamanya aktivitas produksi, konsumsi, dan aktivitas akumulasi aset fisik. SNA dapat dimanfaatkan antara lain untuk kepentingan analisis, perencanaan dan penetapan kebijakan ekonomi. Melalui kerangka SNA, fenomena suatu perekonomian wilayah dapat dijelaskan dan dipahami dengan lebih baik.

Apa Manfaat Perubahan Tahun Dasar?

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB diantaranya adalah:

- a. Menginformasikan kondisi ekonomi terkini, seperti terjadinya perubahan struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- b. Meningkatkan kualitas PDRB;
- c. Menjadikan PDRB dapat diperbandingkan secara nasional.

Apa Implikasi Perubahan Tahun Dasar?

Perubahan tahun dasar PDRB antara lain berdampak pada:

- a. Meningkatkan nilai PDRB, yang pada gilirannya berpengaruh pada perubahan kelompok pendapatan (dari wilayah berpendapatan rendah menjadi menengah atau tinggi), serta pergeseran struktur ekonomi;
- b. Perubahan besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan tabungan, neraca perdagangan, serta struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- c. Perubahan input data untuk keperluan *modeling* dan *forecasting*.

Mengapa Tahun 2010 sebagai tahun dasar?

Terpilihnya tahun 2010 sebagai tahun dasar didasarkan atas beberapa alasan sbb:

- Perekonomian Indonesia pada tahun 2010 relatif stabil;
- Terjadinya perubahan struktur ekonomi Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, terutama di bidang informasi, teknologi dan transportasi. Perubahan ini berpengaruh pada pola distribusi dan munculnya beberapa produk baru;
- Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar, yang harus dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun³;
- Adanya pembaharuan konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, sumber data, dan metodologi penghitungan sesuai rekomendasi SNA 2008;
- Tersedianya data dasar untuk meningkatkan kualitas PDRB seperti hasil Sensus Penduduk 2010 dan Indeks Harga Produsen (*Producers Price Index*);
- Tersedianya kerangka SUT Indonesia tahun 2010, yang menunjukkan keseimbangan antara produksi, konsumsi serta pendapatan yang tercipta dari aktivitas tersebut.

Implementasi SNA 2008 dalam PDRB tahun dasar 2010

Terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya, dan 44 diantaranya merupakan revisi yang utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDB/PDRB tahun dasar 2010 antara lain adalah:

- Konsep dan Cakupan
 - a. Sumber daya hayati (*cultivated biological resources/CBR*). *CBR* merupakan nilai aset alam hasil budidaya manusia, yang diperlakukan sebagai bagian dari output pertanian dan PMTB.

³ SNA1993, para 16.76: "constant price series should not be allowed to run for more than five, or at the most, ten years without rebasing"

Contoh nilai tegakan padi, kelapa sawit dan karet yang belum dipanen, serta nilai sapi perah yang belum menghasilkan.

- b. Sistem persenjataan (*military weapon systems/MWS*). *MWS* merupakan nilai pengeluaran pemerintah untuk pengadaan alat pertahanan dan keamanan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri peralatan militer dan PMTB seperti pesawat tempur, kendaraan lapis baja, dan peluru kendali.
- c. Penelitian dan pengembangan (*research and development/RnD*). *RnD* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas penelitian dan pengembangan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB seperti *RnD* tentang varietas padi, produk otomotif, dan riset pemasaran.
- d. Eksplorasi dan evaluasi mineral (*mineral exploration and evaluation/MEE*). *MEE* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah berhasil atau tidak menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.
- e. Bank Sentral (*Central Bank/CB*). Aktivitas Bank Indonesia yang terkait dengan penyediaan jasa kebijakan moneter dan pengawasan dipisahkan dari jasa intermediasi keuangan. Aktivitas tersebut digabungkan dengan aktivitas penyediaan jasa regulasi yang dihasilkan pemerintahan.
- f. Komputer software (*computer software and databases/CSD*). *CSD* merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunan *databases*, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.

- g. Produk kekayaan intelektual (*entertainment, literary or artistic originals/ELA*). *ELA* merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunannya, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
- h. pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah kegiatan tersebut berhasil ataupun tidak berhasil menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.

- Metodologi

Output jasa intermediasi keuangan. Output industri ini diestimasi dengan metoda FISIM (*Financial intermediation services indirectly measured / FISIM*). *FISIM* dihitung berdasarkan tingkat suku bunga simpanan (*deposits*), bunga pinjaman (*loans*), dan suku bunga referensi (*reference*). Metoda ini menggantikan metoda *Imputed Bank Services Charge (IBSC)*.

- Valuasi

Nilai tambah bruto lapangan usaha dinilai dengan harga dasar (*Basic Price*). Harga dasar merupakan harga keekonomian suatu barang atau jasa pada tingkat produsen, sebelum ada intervensi pemerintah dalam bentuk pajak dan subsidi atas produk.

- Klasifikasi

Klasifikasi yang digunakan adalah Internasional Standard Industrial Classification (ISIC rev.4) dan Central Product Classification (CPC rev.2). BPS mengadopsi kedua jenis klasifikasi tersebut menjadi KBLI 2009 dan KBKI 2010.

Tabel 1.1 Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010

PDRB Tahun Dasar 2000	PDRB Tahun Dasar 2010
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
4. Perubahan Inventori	4. Pembentukan Modal Tetap Bruto
5. Ekspor	5. Perubahan Inventori
6. Impor	6. Ekspor
	7. Impor

<https://kepsulkab.bps.go.id>

|| **BAB II**

METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

<https://kepsulkab.bps.go.id>

2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAHTANGGA (PK-RT)

i. Pendahuluan

Sektor rumahtangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan komponen konsumsi rumahtangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran⁴. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumahtangga juga berperan sebagai produsen serta penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lainnya.

ii. Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumahtangga (PK-RT) merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumahtangga untuk tujuan konsumsi. Rumahtangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama utamanya kelompok makanan dan perumahan.

iii. Cakupan

PK-RT mencakup pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumahtangga residen, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis barang dan jasa tersebut diklasifikasikan menurut *Classifications of Individual Consumption by Purpose (COICOP)*, sbb:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alat kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya

⁴ Untuk Kabupaten/Kota yang mempunyai hasil tambang/industri/perkebunan dan nilai eksportnya sangat tinggi, umumnya nilai konsumsi rumahtangganya relatif lebih rendah

5. Furniture, perlengkapan rumahtangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

Namun dalam publikasi ini, PK-RT hanya diklasifikasi ke dalam 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi komponen PK-RT bersumber dari :

- Survei Sosial Ekonomi Nasional/Daerah (Susenas/Suseda), BPS
- Survei Khusus Konsumsi Rumahtangga Triwulanan (SKKRT), BPS
- Sensus Penduduk 2010, BPS
- Data Sekunder (dari dalam maupun luar BPS)
- Indeks Harga Konsumen (IHK), BPS

v. Metode Estimasi

Komponen PK-RT Tahunan diestimasi dengan metode sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi perkapita Susenas/Suseda (untuk PK-RT Tahunan)
2. Data poin 1 dikalikan dengan penduduk pertengahan tahun, dikalikan 12 (PKRT Tahunan)
3. Data poin 2 dikelompokkan menjadi 12 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas dikontrol secara tersendiri;
4. Terhadap data poin 3, dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan data sekunder atau data/indikator suplai;
5. Diperoleh nilai PK-RT Tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku) ;
6. Susun Indeks implisit PK-RT berdasarkan IHK Kota (provinsi/kota terdekat);
7. Nilai PK-RT atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara membagi hasil poin 5 dengan poin 6.

Catatan:

Komponen PK-RT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan konsumsi rumahtangga triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SKKRT.

2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LEMBAGA NON PROFIT YANG MELAYANI RUMAHTANGGA (PK-LNPRT)

i Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumahtangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri di dalam perekonomian suatu wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggota maupun bagi kelompok rumahtangga tertentu secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga yang ditawarkan di bawah tingkat harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

ii Konsep dan definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Untuk diketahui, sesuai dengan fungsinya LNP dapat dibedakan atas LNP yang melayani rumahtangga (LNPRT) dan LNP yang melayani bukan rumahtangga.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggota atau rumahtangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota yang dimaksud bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/ kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT merupakan nilai output non-pasar yang dihasilkan oleh LNPRT. Nilai output non-pasar diestimasi berdasarkan nilai pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasional. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

- a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis dan barang cetakan; pembayaran rekening listrik, air, telepon, teleks, faksimili; biaya rapat, seminar, perjamuan; biaya transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas; belanja barang dan jasa lainnya; sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lain
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

iv. Sumber Data

- a. Survei Khusus Lembaga Nonprofit yang melayani Rumah Tangga (SK-LNP), BPS
- b. SK-LNP Triwulanan (SK-LNPT), BPS
- c. Hasil *up-dating* direktori LNPRT, BPS
- d. Indeks Harga Konsumen, BPS

v. Metode Estimasi

Komponen PK-LNPRT Tahunan diestimasi dengan metode sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi per jenis lembaga dari hasil SK-LNP;
2. Hasil dari poin 1 dikalikan dengan banyaknya lembaga pada pertengahan tahun dari Direktori LNPRT;
3. Terhadap hasil poin 2 dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan indikator kegiatan hasil SK-LNP seperti jumlah tenaga kerja, penerima layanan, berbagai even seperti munas, rakerda, dan penanganan bencana;

4. Diperoleh nilai PK-LNPRT tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku);
5. Susun Indeks implisit PK-LNPRT berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat);
6. Nilai PK-LNPRT atas dasar harga Konstan (ADHK) diperoleh dengan membagi hasil poin 4 dengan poin 5.

Catatan :

Komponen PK-LNPRT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi LNPRT triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SK-LNPT.

<https://kepsulkab.bps.go.id>

2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH (PK-P)

i. Pendahuluan

Unit pemerintah merupakan unit institusi yang terbentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang legislatif, yudikatif, dan eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas teritori suatu wilayah atau negara. Pemerintah juga berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi individu atau kelompok rumah tangga tertentu, pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, serta berfungsi untuk mendistribusikan pendapatan melalui aktivitas transfer.

Dari sudut pandang lain, unit pemerintah terlibat dalam produksi non-pasar. Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah berperan sebagai konsumen maupun produsen barang dan jasa, serta sebagai regulator yang menetapkan kebijakan di bidang fiskal maupun moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah melakukan aktivitas produksi dan investasi.

ii. Konsep dan Definisi

Nilai PK-P merupakan besarnya nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah untuk dikonsumsi oleh pemerintah itu sendiri. Nilai tersebut diestimasi dengan pendekatan pengeluaran, yakni sebesar nilai pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran kompensasi pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, serta nilai output dari unit Bank Indonesia. Nilai ini masih harus dikurangi nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan melalui unit produksi yang tak terpisahkan dari aktivitas pemerintahan secara keseluruhan. Aktivitas yang dimaksud mencakup aktivitas:

1. Memproduksi barang yang sejenis dengan barang yang diproduksi unit perusahaan seperti publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, dan pembibitan tanaman di kebun percobaan. Aktivitas menghasilkan barang-barang semacam itu bersifat insidental dan di luar fungsi utama dari unit pemerintah.
2. Memproduksi jasa, seperti penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam praktek, pemerintah akan memungut biaya, namun umumnya biaya yang dikenakan tidak akan melebihi seluruh biaya yang dikeluarkan pemerintah. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi atau pendapatan jasa.

iii. Cakupan

Sektor pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, pemerintah kabupaten/kota mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing.

PK-P kabupaten/kota mencakup: a). PK-P desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah kabupaten/kota; b). PK-P kabupaten/kota yang bersangkutan; c). PK-P pusat yang merupakan bagian dari PK-P kabupaten/kota.

iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi PK-P kabupaten/kota tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBD Tahunan, Kementerian Keuangan dan Bappeda
- b. Statistik Keuangan Daerah, BPS
- c. Output Bank Indonesia, Bank Indonesia

- d. Gaji Pegawai Negeri Sipil, Kementerian Keuangan dan Bappeda
- e. Indeks Harga dan Indeks Upah, BPS
- f. Indeks perkembangan pengeluaran pemerintah daerah triwulanan, BPS

v. Metode Estimasi

Komponen PK-P kabupaten/kota Tahunan diestimasi dengan menggunakan metode:

$$\begin{aligned}
 \text{PK-P atas dasar harga Berlaku} &= \text{Output} - \\
 &\quad \text{Penjualan barang dan jasa} + \\
 &\quad \text{Social transfer in kind purchased market production} + \\
 &\quad \text{Output Bank Indonesia}
 \end{aligned}$$

Output non pasar dihitung melalui pendekatan biaya operasional, seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja bantuan sosial dan belanja lain-lain.

Catatan :

1. Komponen PK-P Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi pemerintah daerah triwulanan
2. PK-P atas dasar harga Konstan diestimasi dengan men-deflate PK-P atas dasar harga Berlaku dengan menggunakan deflator berikut:

Jenis Belanja	Deflator	Keterangan
Belanja Pegawai	Indeks Upah	Sama dengan Nasional
Belanja Barang	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penyusutan	Indeks Implisit PMTB	
Belanja Bansos	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional

Penerimaan barang dan jasa	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Social Transfer in kind	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Output BI		Neraca Jasa

<https://kepsulkab.bps.go.id>

2.4 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

i Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor penentu di dalam perkembangan atau pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dalam konteks PDRB, aktivitas investas yang dimaksud adalah investasi dalam bentuk fisik. Aktivitas investasi akan tercermin melalui komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori (PI). Komponen PMTB terkait dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang terlibat dalam proses produksi. Aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal, yakni dalam bentuk bangunan dan konstruksi lainnya; mesin dan perlengkapan; kendaraan; tumbuhan dan ternak; serta barang modal lainnya.

ii Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan barang modal yang ada pada unit produksi dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri, serta barang modal baru maupun barang modal bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer dan barter), serta pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya (*Cultivated Biological Resources/CBR*). Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, serta sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Dalam hal pengurangan barang modal yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal karena digunakan dalam proses produksi secara normal selama periode tertentu.

iii Cakupan

PMTB mencakup :

1. Penambahan dikurangi pengurangan barang modal baik baru maupun bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan dan konstruksi lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*);
2. Biaya alih kepemilikan atas aset non-finansial yang tidak diproduksi seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar barang modal, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya seperti *overhaul* mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi.

iv Sumber Data

- a. Output industri konstruksi, BPS
- b. Nilai impor 2 digit HS, BPS
- c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang, BPS
- d. Laporan Keuangan Perusahaan, Data Sekunder dari luar BPS
- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang, BPS
- f. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), BPS
- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas), BPS
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum, BPS
- i. Publikasi Statistik Konstruksi, BPS
- j. Data Eksplorasi Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan Kementerian Pertanian.

v Metode estimasi

Komponen PMTB diestimasi dengan menggunakan metode langsung ataupun metoda tidak langsung tergantung ketersediaan data di masing-masing daerah.

✓ Metode Langsung:

PMTB atas dasar harga Berlaku (Domestik) = Barang Modal Domestik + TTM + Pajak atas Produk (PPN) + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Berlaku (Impor) = Barang Modal Impor + TTM + Bea Impor + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara men-*deflate* PMTB atas dasar harga Berlaku dengan IHPB sbb:

$$PMTB_{ADHK} = \frac{PMTB_{ADHB}}{IHPB}$$

IHPB yang digunakan adalah IHPB Nasional (2010=100) sesuai jenis barang modal.

✓ Metode Tidak Langsung:

Pendekatan Supply : PMTB atas dasar harga Berlaku = Total Supply Barang x Rasio PMTB

Pendekatan Ekstrapolasi : PMTB atas dasar harga Konstan (t) = PMTB atas dasar harga (t-1) x Indeks

Produksi (t)

2.5 PERUBAHAN INVENTORI (PI)

i Pendahuluan

Dalam suatu perekonomian, inventori atau persediaan merupakan salah satu komponen penting yang dibutuhkan untuk kelangsungan suatu proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal. Komponen tersebut menjadi bagian dari pembentukan modal bruto atau investasi fisik, yang terjadi di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Komponen inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong. Ketersediaan data tentang perubahan inventori pada suatu periode akuntansi menjadi penting guna memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

ii Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang lainnya, yang mempunyai nilai ekonomi atau manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian tersebut adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh produsen.

Nilai perubahan inventori merupakan selisih antara nilai inventori di akhir periode dengan nilai inventori pada awal periode (akuntansi). Perubahan inventori menjelaskan perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (bertanda positif) ataupun pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan dari proses produksi sehingga perlu dicadangkan, baik dalam bentuk bahan baku ataupun bahan penolong. Faktor ketidakpastian yang disebabkan oleh pengaruh dari faktor eksternal juga menjadi pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi

pedagang, pengadaan inventori lebih disebabkan oleh unsur spekulasi, dengan harapan agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Sedangkan bagi pemerintah, pencadangan komoditas yang strategis dimaksudkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, sosial dan politik. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, maka beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, tepung terigu, minyak goreng dan gula pasir perlu dicadangkan oleh pemerintah. Namun bagi rumahtangga, pengadaan inventori barang lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsi.

iii Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang sbb :

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Inventori menurut jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), mencakup semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, mencakup barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yang mencakup barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai);
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau digunakan sebagai bahan bakar atau persediaan; serta
- h. Persediaan pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

iv Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi komponen perubahan inventori adalah :

1. Laporan keuangan perusahaan hasil kegiatan survei atau *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
2. Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD, Data Sekunder dari luar BPS
3. Data komoditas pertambangan, Statistik Pertambangan dan Penggalian BPS;
4. Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang, BPS;
5. Data komoditas perkebunan;
6. Indeks harga implisit PDRB industri terpilih;
7. Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih;
8. Data persediaan beras, Bulog; data semen, Asosiasi Semen Indonesia; data gula, Dewan Gula Indonesia ; dan data ternak, Ditjennak Kementan.

v Metode Estimasi

Komponen Perubahan Inventori (PI) diestimasi dengan menggunakan metode revaluasi atau deflasi berdasarkan jenis komoditas.

a. Revaluasi

Metode ini digunakan untuk komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan pertambangan.

PI atas dasar harga Berlaku = Volume inventori (t) – Volume inventori (t-1) x Harga per unit

PI atas dasar harga Konstan = PI atas dasar harga Berlaku / IHPB

b. Deflasi

Metode ini digunakan untuk komoditas industri pengolahan dan komoditas lainnya.

PI atas dasar harga Konstan = Inventori (t) atas dasar harga Berlaku/IHPB (t) -

Inventori (t-1) atas dasar harga Berlaku/IHPB (t-1)

PI atas dasar harga Berlaku = PI atas dasar harga Konstan x IHPB rata-rata (t)

<https://kepsulkab.bps.go.id>

2.6 EKSPOR - IMPOR

i Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan. Ragam barang dan jasa yang diproduksi maupun disparitas harganya menjadi faktor utama munculnya aktivitas tersebut. Wilayah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan-nya sendiri berusaha untuk mendatangkan dari luar wilayah atau bahkan dari luar negeri. Di sisi lain, wilayah yang memproduksi barang dan jasa melebihi kebutuhan domestik-nya, terdorong untuk memperluas pasar ke luar wilayah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas berbagai barang dan jasa semakin meningkat. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus dan distribusi barang dan jasa. Kondisi ini semakin mendorong aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah.

ii Konsep dan definisi

Ekspor-impor didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (melalui aktivitas penjualan/pembelian, barter, pemberian atau hibah) barang dan jasa antar residen wilayah tersebut dengan non-residen (yang berada di luar wilayah atau luar negeri).

iii Cakupan

Ekspor-Impor ke dan dari suatu wilayah kabupaten/kota terdiri dari:

- a. Ekspor ke luar provinsi/kabupaten/kota
- b. Impor dari luar provinsi/kabupaten/kota.

Selisih antara ekspor dan impor didefinisikan sebagai Net Ekspor.

iv Sumber Data

Nilai ekspor-impor wilayah kabupaten/kota didasarkan pada penghitungan Net Ekspor. Namun sering kali untuk mengestimasi tidak ada data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Kondisi inilah yang menyebabkan Net Ekspor kabupaten/kota diperlakukan sebagai item penyeimbang (*residual*), yakni perbedaan antara PDRB menurut pengeluaran dengan PDRB menurut lapangan usaha. Selanjutnya dilakukan pemisahan Net Ekspor menjadi ekspor dan impor dengan menggunakan metoda tidak langsung.

<https://kepsulkab.bps.go.id>

<https://kepsulkab.bps.go.id>

III BAB III

**TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN
KEPULAUAN SULA MENURUT PDRB PENGELUARAN
2010 -2017**

<https://kepsulkab.bp.go.id>

3.1 PERKEMBANGAN PDRB PENGELUARAN

Sebagaimana diketahui bahwa sejak tahun 2015, PDRB diestimasi menggunakan tahun dasar 2010 (2010=100) menggantikan tahun dasar 2000 (2000=100). Penyusunan PDRB dengan tahun dasar 2010 (2010=100) selain dimaksudkan untuk pembaruan seluruh wilayah di Indonesia termasuk di Kepulauan Sula.

Data menunjukkan bahwa setiap komponen pengeluaran mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Sebagian besar produk barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah domestik Kabupaten Kepulauan Sula digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah). Sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik dalam bentuk PMTB serta perubahan inventori.

Dari tahun ke tahun, kondisi perekonomian Kabupaten Kepulauan Sula menunjukkan adanya peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari PDRB Kepulauan Sula menurut pengeluaran yang terus meningkat dengan pertumbuhan ekonomi yang terus menunjukkan arah positif selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Peningkatan kondisi perekonomian Kepulauan Sula juga dapat ditinjau dari peningkatan PDRB masing-masing komponen pengeluaran sebagai berikut:

**Tabel 3.1 PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Kepulauan Sula
2014-2018**

**Table 3.1 GRDP at current price by Expenditure, Region of Sula Islands
2014-2018**

(Miliar)

Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	888.90	975.06	1,081.70	1,174.73	1,283.38
2. Konsumsi LNPRT	8.74	9.66	10.57	11.73	13.99
3. Konsumsi Pemerintah	399.51	443.45	465.19	502.03	585.28
4. PMTB	443.78	495.94	536.11	576.13	615.64
5. Perubahan Inventori	(38.72)	100.46	(14.48)	(30.88)	69.17
6. Ekspor	1,154.34	1,244.06	1,682.33	1,678.80	1,878.78
7. Impor	1,247.80	1,476.09	1,813.06	1,793.28	2,156.12
Total PDRB	1,608.75	1,792.56	1,948.34	2,119.25	2,290.11

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Selama tahun 2014 sampai dengan 2018, angka PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kepulauan Sula menunjukkan peningkatan yang cukup baik. Dalam kurun waktu 5 tahun PDRB Kabupaten Kepulauan Sula mengalami peningkatan sebesar 681,3 miliar rupiah. Pada tahun 2014, PDRB Kabupaten Kepulauan Sula terhitung sebesar 1,61 triliun rupiah kemudian menjadi 2,29 triliun rupiah pada tahun 2018.

Berdasarkan Tabel 1.1, Perekonomian Kabupaten Kepulauan Sula pada tahun 2018 dari sisi pengeluaran didominasi oleh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT). Hal ini masih sejalan dengan kondisi pada tahun-tahun sebelumnya dimana PKRT selalu menjadi penyumbang terbesar total PDRB Kepulauan Sula. Pada tahun 2017, PKRT Kepulauan Sula adalah sebesar 1,17 triliun rupiah atau mengalami pertambahan sebesar 88,27 miliar dari tahun 2016. Sedangkan di tahun 2018, angka tersebut kembali mengalami pertambahan menjadi 1,28 triliun rupiah. Selain PKRT, secara nominal setiap komponen mengalami peningkatan nilai PDRB pada tahun 2018 dan

memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap peningkatan PDRB Kabupaten Kepulauan Sula secara total.

Selain dinilai atas dasar harga yang berlaku, PDRB pengeluaran juga dinilai atas dasar harga Konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang divalusi dengan harga tahun 2010. Penilaian PDRB atas dasar harga konstan akan memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 juga dapat menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil yang ditunjukkan dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi barang dan jasa di suatu wilayah .

Jika dinilai berdasarkan harga konstan, PDRB Kepulauan Sula juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan Tabel 3.2, pada tahun 2018, PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Kepulauan Sula tercatat sebesar 1,47 triliun rupiah. Angka PDRB tersebut tumbuh sebesar 5,00 persen dari PDRB tahun 2016.

Peningkatan juga terjadi di setiap komponen PDRB yakni Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKP), Pengeluaran Konsumsi LNPRT (PKLNPRT), Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP), dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori (PI), dan Net Ekspor Kepulauan Sula. Pada tahun 2018, PKRT mengalami pertambahan sebesar 40,47 miliar rupiah atau tumbuh sebesar 4,76 persen. Peningkatan tersebut mengalami perlambatan bila dibandingkan peningkatan laju pertumbuhan sebelumnya yang sebesar 4,76.

Tabel 3.2 PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Kepulauan Sula 2014 - 2018

Table 3.2 GRDP at 2010 Constant Price by Expenditure, Region of Sula Islands 2014-2018

(Miliar Rp)

Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	736.93	770.46	809.22	849.44	889.91
2. Konsumsi LNPRT	7.45	7.75	8.16	8.59	9.89
3. Konsumsi Pemerintah	313.03	335.64	341.51	356.97	396.20
4. PMTB	389.42	422.61	449.65	470.96	476.19
5. Perubahan Inventori	(32.31)	100.32	(10.48)	(14.35)	31.17
6. Ekspor	1,033.84	1,112.40	1,216.32	1,309.82	1,397.83
7. Impor	1,194.24	1,421.37	1,418.73	1,516.69	1,658.30
Total PDRB	1,254.12	1,327.81	1,395.65	1,464.73	1,542.90

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Dari Tabel 3.2 terlihat bahwa PKLNPRRT Kabupaten Kepulauan Sula berdasarkan harga konstan meningkat yang disertai dengan percepatan laju pertumbuhan. Pada tahun 2017, PDRB ADHK PKLNPRRT adalah sebesar 8,59 miliar rupiah. Angka tersebut mengalami penambahan sebesar 430,22 juta rupiah sehingga menjadi 9,89 miliar rupiah pada tahun 2018.

Hal serupa juga terjadi pada komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) dan PMTB. Pada tahun 2018 angka PDRB PKP adalah sebesar 396,20 miliar rupiah. Angka tersebut mengalami meningkat cukup signifikan menjadi sebesar 39,24 miliar rupiah dari PDRB tahun 2017 (356,97 miliar rupiah). Sementara itu, PMTB juga mengalami peningkatan meski dengan laju yang lebih kecil dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2018, angka PDRB Kabupaten Kepulauan Sula adalah sebesar 476,19 miliar rupiah atau mengalami penambahan sebesar 5,23 miliar rupiah dari angka PDRB PMTB tahun 2017.

Berbeda dari kondisi tahun sebelumnya, Perubahan Inventori mengalami kenaikan sedangkan Net Ekspor Kepulauan Sula tetap menurun di tahun 2018. Angka Perubahan Inventori (PI) tahun 2017 adalah 14,01 miliar rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa persediaan/inventori pada akhir tahun lebih besar dari persediaan di awal tahun. Ini berarti, adanya peningkatan jumlah persediaan yang dapat disebabkan salah satunya oleh pemasaran barang yang belum sempurna. Disisi lain, Net Ekspor Kepulauan Sula mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan Impor Kepulauan Sula yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sejalan dengan kondisi beberapa tahun sebelumnya, pada tahun 2017, Impor Kepulauan Sula mengalami penambahan menjadi sebesar 1,52 triliun rupiah dan kemudia meningkat sebesar 141,60 miliar rupiah menjadi 1,66 triliun rupiah. Akan tetapi kali ini, peningkatan Impor tersebut juga diikuti oleh peningkatan Ekspor. Namun kenyataanya, peningkatan ekspor tersebut belum dapat disandingkan dengan peningkatan impor. Peningkatan ekspor di tahun 2018 lebih lambat dibandingkan dengan peningkatan impor sehingga menyebabkan Net Ekspor Kepulauan Sula tetap tumbuh negatif.

Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Sula Periode 2014-2018

Terbentuknya total PDRB pengeluaran tidak terlepas dari kontribusi seluruh komponen, yang terdiri dari komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumahtangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Ekspor Neto (E) atau Ekspor minus Impor barang dan jasa.

**Tabel 3.3 Distribusi PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran,
Kabupaten/Kota Kepulauan Sula 2014-2018**

Table 3.3 Distribution of GRDP at Current Price by Expenditure, Kepulauan Sula 2014-2018

Komponen Pengeluaran	(%)				
	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	55.25	54.40	55.52	55.43	56.04
2. Konsumsi LNPRT	0.54	0.54	0.54	0.55	0.61
3. Konsumsi Pemerintah	24.83	24.74	23.88	23.69	25.56
4. PMTB	27.59	27.67	27.52	27.19	26.88
5. Perubahan Inventori	(2.41)	5.60	(0.74)	(1.46)	3.02
6. Net Ekspor	(5.81)	(12.94)	(6.71)	(5.40)	(12.11)
Total PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Dari Tabel 3.3 terlihat bahwa selama periode 2014-2016, PDRB Kabupaten Kepulauan Sula sebagian besar disumbangkan oleh konsumsi akhir rumahtangga (PK-RT). Pada tahun 2017, kontribusi PKRT terhadap total PDRB Kepulauan Sula dari sisi pengeluaran adalah 55,43 persen dan menjadi 56,04 persen di tahun 2018. Disamping itu, pengeluaran untuk aktivitas pembentukan modal (PMTB) juga mempunyai kontribusi yang relatif besar, yakni sekitar 26,88 persen. Sementara itu, net ekspor menunjukkan kontribusi yang negatif terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Sula. Negatifnya angka kontribusi menunjukkan bahwa masih tingginya kontribusi impor dalam PDRB Kepulauan Sula jika dibandingkan dengan kontribusi ekspor. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian kebutuhan domestik masih harus dipenuhi oleh produk yang berasal dari luar wilayah atau bahkan luar negeri (impor).

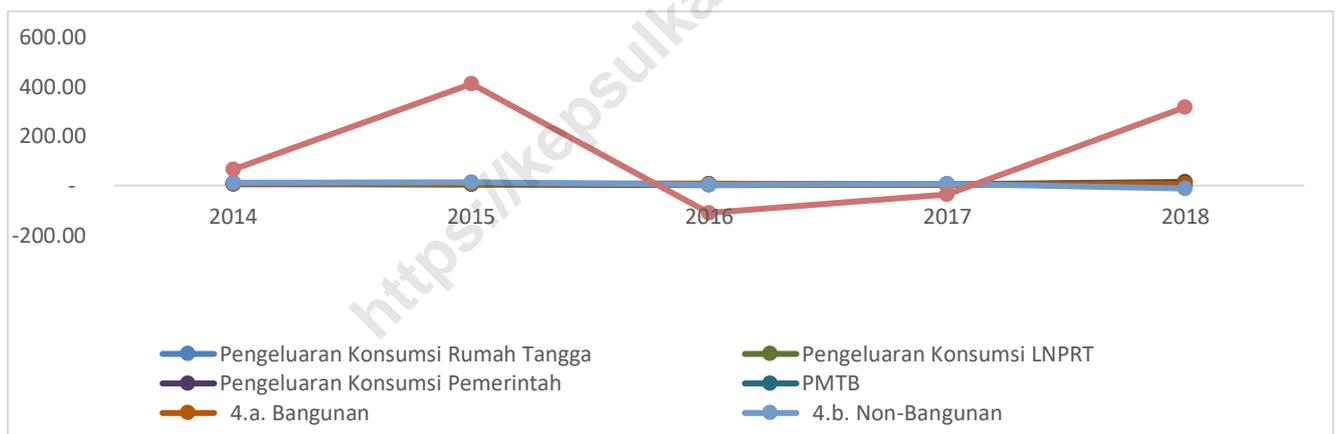
Hampir sebanding dengan PMTB, Kontribusi komponen konsumsi pemerintah (PK-P) juga memberikan kontribusi sebesar 25,56 persen. Hal tersebut menunjukkan peran pemerintah dalam menyerap PDRB semakin baik. Pada tahun 2017, kontribusi PKP dalam PDRB mengalami peningkatan sebesar 23,69 persen dan kemudian menjadi 25,56 persen di tahun 2018.

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Sula 2014-2018

Agregat makro lain yang diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Indikator ekonomi ini dapat menggambarkan kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Sebagaimana terlihat dari Gambar 3.2, selama periode tahun 2014-2017, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Sula mengalami perlambatan, yakni sebesar 6,13 persen (2014); 5,88 persen (2015); 5,11 persen (2016); 4,95 persen (2017). Namun pada tahun 2018, mengalami percepatan menjadi 5,34 persen.

Gambar 3.2 Pertumbuhan PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Kepulauan Sula 2014-2018

Figure 3.2 Growth Rate of GRDP at 2010 Constant Prices According to Expenditures, Kepulauan Sula 2014-2018



Komponen Pengeluaran		2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1. Konsumsi Rumah Tangga	5.13	4.55	5.03	4.97	4.76	
2. Konsumsi LNPRT	8.38	4.02	5.34	5.27	15.15	
3. Konsumsi Pemerintah	7.90	7.22	1.75	4.53	10.99	
4. PMTB	8.50	8.52	6.40	4.74	1.11	
5. Perubahan Inventori	65.95	410.55	-110.45	-36.89	317.24	
6. Ekspor	87.96	7.60	9.34	7.69	6.72	
7. Impor	89.48	19.02	-0.19	6.91	9.34	
Total PDRB	6.13	5.88	5.11	4.95	5.34	

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Indeks Implisit dan Pertumbuhan Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran

Indeks implisit⁵ merupakan perbandingan antara PDRB ADHB terhadap PDRB ADHK. Indeks implisit PDRB pengeluaran mampu menggambarkan besarnya perubahan harga yang terjadi dari sisi konsumen yakni rumahtangga, LNPRT, pemerintah, dan perusahaan dalam bentuk konsumsi barang dan jasa, baik yang digunakan untuk keperluan konsumsi akhir, investasi maupun ekspor/impor di suatu wilayah pada periode tertentu terhadap harga pada periode tahun dasar (2010) (BPS, 2019). pertumbuhan indeks implisit menunjukkan laju perubahan harga dari tahun ke tahun terhadap harga tahun dasar (2010).

Tabel 3.5 dan 3.6 akan menunjukkan tingkat kenaikan harga selama periode tahun 2014 – 2018, baik perubahan harga konsumen yang terjadi secara umum maupun pada masing-masing komponen.

Tabel 3.4 Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran, Kabupaten Kepulauan Sula 2014-2018
Table 3.4. Implicit Index of GRDP by Expenditure, Kepulauan Sula 2014-2018

Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	120.62	126.56	133.67	138.29	144.21
2. Konsumsi LNPRT	117.44	124.78	129.60	136.51	141.41
3. Konsumsi Pemerintah	127.62	132.12	136.21	140.64	147.72
4. PMTB	113.96	117.35	119.23	122.33	129.28
5. Perubahan Inventori	119.86	100.14	138.16	215.19	221.89
6. Ekspor	111.66	111.84	138.31	128.17	134.41
7. Impor	104.48	103.85	127.79	118.24	130.02
Total PDRB	128.28	135.00	139.60	144.69	148.43

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

⁵ Indeks perkembangan

**Tabel 3.5 Pertumbuhan Indeks Implisit PDRB Pengeluaran, Kabupaten Kepulauan Sula
2014-2018**

Table 3.5 Implicit Index Growth of GRDP by Expenditure, Kepulauan Sula 2014-2018

Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	5.03	4.92	5.62	3.46	4.28
2. Konsumsi LNPRT	7.10	6.26	3.86	5.33	3.59
3. Konsumsi Pemerintah	6.27	3.53	3.10	3.25	5.04
4. PMTB	4.61	2.98	1.60	2.60	5.68
5. Perubahan Inventori	273.31	-16.45	37.97	55.75	3.11
6. Ekspor	-42.22	0.16	23.68	-7.33	4.87
7. Impor	-47.91	-0.61	23.06	-7.48	9.97
Total PDRB	7.04	5.24	3.41	3.64	2.59

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Berdasarkan Tabel 3.5 dan 3.6, terlihat bahwa pada tahun 2018, kenaikan harga paling tinggi terjadi pada barang-barang inventori. Pada tahun 2018, indeks implisit perubahan inventori adalah sebesar 221,89. Ini menunjukkan bahwa, harga barang-barang inventori meningkat sebesar 2,22 kali harga tahun dasar (2010). Angka tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 3,11 persen dari indeks implisit tahun sebelumnya.

Di sisi lain, perubahan harga cukup tinggi juga terjadi pada barang/jasa yang dikonsumsi oleh pemerintah. Indeks implisit konsumsi pemerintah menunjukkan perubahan harga barang/jasa yang dikonsumsi pemerintah sebesar 1,47 kali harga pada tahun dasar (2010). Perubahan harga tersebut hampir sebanding dengan perubahan harga yang terjadi pada barang/jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dan LNPRT dengan perubahan harga masing-masing unit institusi sebesar 1,44 dan 1,41 kali harga barang/jasa pada tahun dasar.

Dari segi pertumbuhan, komponen dengan laju perubahan harga paling tinggi terjadi pada harga barang/jasa impor serta barang dan jasa yang dikonsumsi sebagai PMTB. Pertumbuhan Indeks

implisit untuk masing-masing komponen tersebut adalah 9,97 dan 5,68 persen. Kenaikan harga ini dapat dikatakan cukup signifikan terutama pada harga barang impor yang mengalami perubahan arah pertumbuhan. Pada tahun 2017, harga barang-barang yang diimpor tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini ditunjukkan oleh angka laju indeks implisit yang sebesar negatif 7,48 persen. Angka tersebut berarti bahwa perubahan harga barang impor pada tahun 2017 terhadap tahun 2010 lebih kecil jika dibandingkan dengan perubahan harga impor tahun 2016 terhadap tahun 2010. Akan tetapi, angka itu kemudian menjadi positif di tahun 2018 sebesar 9,97 persen.

Hampir serupa dengan impor, pada tahun 2018, komponen PMTB juga mengalami laju perubahan harga yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2017. Laju perubahan ini merupakan yang paling tinggi selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2018, indeks implisit komponen PMTB meningkat 5,68 persen menjadi 1,29 kali harga tahun dasar 2010.

3.2 PERKEMBANGAN KOMPONEN PDRB PENGELUARAN

Perubahan struktur perekonomian suatu wilayah sebagai akibat dari upaya pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pada periode tertentu, tidak terlepas dari perilaku masing-masing komponen pengguna akhir. Setiap komponen mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuan akhir penggunaan barang dan jasa. Data empiris menunjukkan bahwa sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia pada periode tertentu digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir oleh rumahtangga, LNPRT dan pemerintah, sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori. Berikut perilaku masing-masing komponen PDRB pengeluaran Kabupaten Kepulauan Sula untuk periode 2014-2018.

3.2.1. Konsumsi Akhir Rumahtangga

Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumahtangga (PK-RT) merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Data berikut menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kabupaten Kepulauan Sula, sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Dengan demikian rumah tangga menjadi penyumbang utama nilai tambah barang dan jasa di Kabupaten Kepulauan Sula.

Dalam suatu perekonomian, fungsi utama dari institusi rumahtangga adalah sebagai konsumen akhir (*final consumer*) atas barang dan jasa yang tersedia, termasuk konsumsi oleh rumah tangga khusus (seperti penjara, asrama dan lain-lain). Selanjutnya, berbagai jenis barang dan jasa yang dikonsumsi tersebut akan diklasifikasikan menurut 7 (tujuh) kelompok COICOP (*Classification of Individual Consumption by Purpose*), yaitu kelompok makanan dan minuman selain restoran; pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; perumahan dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; angkutan dan komunikasi; restoran dan hotel; serta kelompok barang dan jasa lainnya.

Data berikut menunjukkan bahwa pada periode tahun 2014-2018 pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga mengalami (peningkatan/penurunan) signifikan, baik dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku) maupun secara riil (atas dasar harga konstan). Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumahtangga. Pada gilirannya kenaikan tersebut juga akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Tabel 3.6 Perkembangan Komponen Konsumsi Rumahtangga Kabupaten Kepulauan Sula 2014-2018

Table 3.6 Trend of Using on Final Household Consumption of Kepulauan Sula 2014-2018

Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (Miliar Rp)	888.90	975.06	1,081.70	1,174.73	1,283.38
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	736.93	770.46	809.22	849.44	889.91
c. Proporsi terhadap PDRB (ADHB) (Persen)	55.25	54.40	55.52	55.43	56.04
Jumlah Penduduk (Jiwa)	93435	95285	97177	99196	100967
Rata-Rata Konsumsi Per-Kapita/Tahun					
a. ADHB (Juta Rp)	9.51	10.23	11.13	11.84	12.71
b. ADHK 2010 (Juta Rp)	7.89	8.09	8.33	8.56	8.81
c. Pertumbuhan ADHK 2010 (Persen)	5.13	4.55	5.03	4.97	4.76

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Pengeluaran konsumsi rumah tangga memegang peranan penting dalam penciptaan nilai tambah PDRB dari sisi pengeluaran di Kepulauan Sula. Pada tahun 2018, terjadi peningkatan nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga baik dari segi nilai PDRB maupun kontribusinya terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga. Selama periode 2014–2018, proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap total PDRB secara umum meningkat dengan nilai kontribusi rata-rata di atas 50 persen yaitu 54,40 persen (2014); 55,52 (2015); 55,43 persen (2016); 56,04 persen (2017); dan 54,40 persen (2018). Pada tahun 2017 terjadi penurunan nilai ekspor Kepulauan Sula yang menyebabkan

turunnya kontribusi ekspor terhadap total PDRB Kepulauan Sula dan menyebabkan peran tersebut semakin diambil oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga.

Pada masa pemulihan ekonomi, biasanya institusi rumahtangga memperbaiki perilaku atau pola konsumsinya. Hal tersebut terjadi karena secara umum tingkat pendapatan masyarakat akan naik dan di sisi lain persediaan atau penawaran berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik bertambah. Kondisi semacam ini memicu naiknya belanja untuk keperluan konsumsi, termasuk konsumsi rumahtangga. Peristiwa lain yang memacu meningkatnya konsumsi rumah tangga saat ini ialah munculnya tren belanja online dimana berbagai barang dan jasa ditawarkan melalui *platform* atau media-media sosial yang mampu menjangkau seluruh masyarakat dengan mudah.

Secara rata-rata, konsumsi perkapita meningkat dari tahun ke tahun baik menurut atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2013, setiap rumahtangga di Kabupaten Kepulauan Sula menghabiskan dana sekitar 8,81 juta rupiah setahun untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya. Pengeluaran tersebut meningkat menjadi 9,51 juta rupiah pada tahun 2014; 10,23 juta rupiah pada tahun 2015; 11,13 juta rupiah pada tahun 2016; 11,80 juta rupiah pada tahun 2017 dan 12,71 juta rupiah pada tahun 2018. Sementara itu atas dasar harga Konstan (2010), selama periode 2014 hingga 2018, rata-rata konsumsi per rumahtangga tumbuh pada kisaran 2,82 persen, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 2,98 persen.

Di sisi lain, kenaikan rata-rata konsumsi per-kapita cenderung searah dengan kenaikan jumlah penduduk. Pertumbuhan rata-rata konsumsi per-kapita menunjukkan tanda positif, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Kondisi ini menunjukkan rata-rata konsumsi setiap penduduk meningkat, baik secara kuantitas (*volume*) maupun secara nilai (termasuk peningkatan kualitas). Rata-rata konsumsi per-kapita yang secara "riil" meningkat pada kisaran 1 s.d 3 tentu berpengaruh pada struktur konsumsi rumahtangga, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7 Struktur Komponen Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Kepulauan Sula 2014-2018
Table 3.7 Structure of Household Final Consumption Expenditure, Kepulauan Sula
2014-2018⁶

Komponen PKP	(%)				
	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Makanan, Minuman, dan Rokok	62.32	61.27	61.57	61.78	59.83
2. Pakaian dan Alas Kaki	4.40	4.38	4.20	4.16	4.54
3. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan Ruta	11.56	11.87	12.11	11.75	12.38
4. Kesehatan dan Pendidikan	3.29	3.38	3.43	3.46	3.39
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	11.86	12.10	11.63	11.82	12.65
6. Hotel dan Restoran	1.53	1.54	1.59	1.61	1.74
7. Lainnya	5.05	5.47	5.46	5.43	5.48
Total Konsumsi Rumah Tangga	100	100	100	100	100

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Selama 5 tahun terakhir, konsumsi rumah tangga terus mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,89 persen namun dalam 2 tahun terakhir, pertumbuhan komponen ini mengalami sedikit perlambatan. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada tahun 2016 adalah 5,03 persen. Angka tersebut kemudian menurun menjadi 4,97 persen dan 4,76 persen di tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan tabel 3.8, dapat diketahui bahwa subkomponen yang mengalami perlambatan laju pertumbuhan adalah Makanan, minuman, dan rokok serta kesehatan dan Pendidikan.

Penurunan laju pertumbuhan di kedua sub komponen tersebut terutama makanan, minuman, dan rokok menjadi pemicu turunnya pertumbuhan PDRB komponen konsumsi rumah tangga di Kepulauan Sula. Sebagian besar penduduk Kepulauan Sula merupakan penduduk dengan kelas ekonomi menengah ke bawah. Berdasarkan tren data kemiskinan BPS, pola konsumsi masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan cenderung lebih tinggi pada konsumsi di sub komponen makanan, minuman, dan rokok. Masyarakat dengan kelas ekonomi menengah ke bawah cenderung konsumtif pada sub komponen tersebut. Hal ini sejalan dengan kondisi di Kabupaten Kepulauan Sula.

⁶ Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB)

Dengan rata-rata kontribusi mencapai lebih dari 55 persen, sedikit saja penurunan pada sub komponen makanan, minuman, dan rokok akan berakibat pada turunnya pertumbuhan pengeluaran konsumsi secara umum di Kabupaten Kepulauan Sula.

Sementara itu, tingkat perubahan harga yang secara implisit disajikan dalam Tabel 3.9, menunjukkan peningkatan setiap tahun untuk masing-masing kelompok pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pada tahun 2018, pertumbuhan peningkatan harga relatif tinggi terjadi pada harga kelompok Hotel dan Restoran serta Makanan, Minuman, dan Rokok yaitu masing-masing sebesar 5,52 persen dan 4,47 persen.

Tabel 3.8 Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Kepulauan Sula 2014-2018

Table 3.8 Implicit Growth (Price Indices) of Household Final Consumption Expenditure, Kepulauan Sula 2014-2018⁷

Komponen PKP	(%)				
	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Makanan, Minuman, dan Rokok	3.51	4.31	6.86	4.04	4.47
2. Pakaian dan Alas Kaki	9.62	4.63	2.08	3.36	2.74
3. Perumahan, Perkakas, Perengkapan Ruta	6.51	5.19	6.21	2.31	2.59
4. Kesehatan dan Pendidikan	4.89	5.20	8.09	1.85	2.92
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	8.56	4.34	-0.39	3.07	4.16
6. Hotel dan Restoran	4.53	2.05	2.53	2.04	5.52
7. Lainnya	8.93	12.28	5.34	1.97	3.90
Konsumsi Rumah Tangga	5.03	4.92	5.62	3.46	4.28

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

3.2.2. Konsumsi Akhir LNPRT

Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) adalah salah satu unit institusi yang melakukan kegiatan produksi, konsumsi dan akumulasi aset. Keberadaannya diakui oleh hukum atau masyarakat, terpisah dari orang atau entitas lain yang memiliki atau mengendalikan. Dalam

⁷ Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB)

kegiatannya, LNPRT merupakan mitra pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, kesehatan, dan lingkungan hidup.

**Tabel 3.9 Perkembangan Pengeluaran Akhir Konsumsi LNPRT
Kabupaten Kepulauan Sula 2014-2018**
**Table 3.9 Trend of NPISH Final Consumption Expenditure, Kepulauan Sula
2014-2018**

Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB (Miliar Rp)	8.74	9.66	10.57	11.73	13.99
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	7.45	7.75	8.16	8.59	9.89
Pertumbuhan Konsumsi LNPRT	8.38	4.02	5.34	5.27	15.15
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	0.54	0.54	0.54	0.55	0.61

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Total pengeluaran konsumsi LNPRT dalam kurun waktu tahun 2014-2018 mengalami peningkatan baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Pada tahun 2014, konsumsi LNPRT sebesar 8,74 miliar rupiah, kemudian pada tahun-tahun berikutnya yaitu 9,66 miliar rupiah pada tahun 2015, 10,57 miliar rupiah pada tahun 2016, 11,73 miliar rupiah pada tahun 2017 dan 13,99 miliar rupiah di tahun 2018. Berdasarkan tabel 3.10, pengeluaran konsumsi LNPRT atas dasar harga konstan terus mengalami pertumbuhan yang positif. Pada tahun 2018, pertumbuhan konsumsi LNPRT meningkat hingga 15,15 persen atau sekitar 3 kali pertumbuhan tahun sebelumnya.

Pertumbuhan yang tinggi di komponen pengeluaran konsumsi LNPRT dipacu oleh pemilihan serentak umum tahun 2019. Pengeluaran konsumsi dilakukan oleh LNPRT khususnya partai politik dalam menunjang kebutuhan partai politik dan pasangan calon yang diusung menjelang pemilu 2019. Umumnya, kegiatan konsumsi menjelang pemilu dilakukan dalam bentuk kampanye dan sosialisasi partai politik. Paengeluaran tersebut tentu menjadi pendongkrak tingginya pertumbuhan

PDRB pengeluaran komponen konsumsi LNPRT. Hal ini terjadi karena sebagian besar LNPRT di Kepulauan Sula berorientasi pada jenis Lembaga organisasi masyarakat dan Lembaga keagamaan. Berdasarkan jumlah organisasi masyarakat yang terdaftar, partai politik memiliki jumlah dan pendanaan paling besar diantara jenis organisasi masyarakat lainnya. Hal ini menyebabkan pengeluaran konsumsi partai politik yang tinggi akan memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap perubahan konsumsi LNPRT pada umumnya.

3.2.3. Konsumsi Akhir Pemerintah

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Individu dan Pengeluaran Konsumsi Kolektif. Barang dan jasa individu merupakan barang dan jasa privat, dimana ciri-ciri barang privat adalah a) *Scarcity*, yaitu ada kelangkaan/keterbatasan dalam jumlah. b) *Excludable consumption*, yaitu konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu (biasanya harga). c) *Rivalrous competition*, yaitu konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa individu adalah jasa pelayanan kesehatan pemerintah di rumah sakit/puskesmas dan jasa pendidikan di sekolah/universitas negeri.

Sedangkan barang dan jasa kolektif ekuivalen dengan barang publik yang memiliki ciri a) *Non rivalry*, yaitu pengeluaran satu konsumen terhadap suatu barang tidak mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut. b) *Non excludable*, yaitu apabila suatu barang publik tersedia, maka tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain setiap orang memiliki akses ke barang tersebut. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa kolektif adalah jasa pertahanan yang dilakukan TNI dan keamanan yang dilakukan kepolisian.

Tabel 3.10 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula 2014-2018
Table 3.10 Trend of Government Final Consumption Expenditure, Kepulauan Sula 2014 – 2018

Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB (Miliar Rp)	399.51	443.45	465.19	502.03	585.28
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	313.03	335.64	341.51	356.97	396.20
Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah	8.04	7.03	5.68	5.58	9.96
Rata-rata Konsumsi Perkapita					
c. ADHB (Juta Rp)	4.28	4.65	4.79	5.06	5.80
d. ADHK (Juta Rp)	3.35	3.52	3.51	3.60	3.92
Pertumbuhan PKP Perkapita	2.85	2.52	2.99	2.83	2.93
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	24.83	24.74	23.88	23.69	25.56

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2014 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga berlaku adalah sebesar 399,51 miliar rupiah, kemudian meningkat dari tahun ke tahun menjadi 585,28 pada tahun 2018. Hal ini mengindikasikan bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas. Peningkatan ini dipacu oleh meningkatnya anggaran penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula pada tahun 2018.

Menarik untuk dicermati lebih lanjut bahwa proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDB juga mengalami peningkatan dari 23,69 persen (tahun 2017) menjadi 25,56 persen (tahun 2018). Sepanjang periode 2014 hingga 2018, proporsi terendah terjadi pada tahun 2017 yakni sebesar 23,69 persen; sedangkan proporsi tertinggi pada tahun 2018. Hal ini disebabkan oleh penurunan anggaran penyelenggaraan pemerintah pada tahun 2017 di beberapa pos anggaran.

Salah satu fungsi pemerintah adalah memberikan jasa layanan pada publik atau masyarakat dalam bentuk jasa kolektif maupun individual. Dalam praktek, pengeluaran pemerintah ini selalu dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik), meskipun tidak seluruh masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Ketika pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan peningkatan, hal tersebut akan diikuti oleh adanya peningkatan pada rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita. Pada tahun 2014 konsumsi pemerintah per-kapita atas dasar harga berlaku sebesar 4,28 juta rupiah, terus meningkat pada tahun-tahun setelah itu, yaitu menjadi 4,65 juta rupiah (2015); 4,79 juta rupiah (2016); 5,06 juta rupiah (2017); dan 5,80 juta rupiah pada tahun 2018.

Secara umum, rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita atas dasar harga konstan 2010 juga menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya, dengan masing-masing senilai 3,35 juta rupiah (2014); 3,52 juta rupiah (2015); 3,51 juta rupiah (2016); 3,60 juta rupiah (2017); dan 3,92 juta rupiah (2018). Hal ini menunjukkan adanya peningkatan pengeluaran konsumsi pemerintah secara kuantitas, dengan laju pertumbuhan sebesar 2,40 persen (2015) menjadi 9,04 persen di tahun 2018.

3.2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)⁸. Fungsi kapital adalah

⁸ Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor

sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Pengelompokan PMTB pada PDRB tahun dasar 2010 dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu Bangunan dan Non Bangunan. Data di bawah ini menjelaskan bahwa, secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2014 – 2018 mengalami penurunan dari 8,50 persen (2014) menjadi hanya sebesar 1,11 di tahun 2018. Penurunan laju pertumbuhan komponen PMTB ini disebabkan oleh menurunnya nilai tambah PMTB non bangunan pada tahun 2018.

Tabel 3.11 Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Kepulauan Sula 2014-2018
Table 3.11 Trend and Structure of GFCF, Kepulauan Sula 2014–2018

Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PMTB					
a. ADHB (Miliar Rp)	443.78	495.94	536.11	576.13	615.64
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	389.42	422.61	449.65	470.96	476.19
Proporsi terhadap PDRB (%)	27.59	27.67	27.52	27.19	26.88
Proporsi PMTB (ADHB)					
a. Bangunan (%)	68.28	66.56	67.91	65.41	68.34
b. Non Bangunan (%)	31.72	33.44	32.09	34.59	31.66
Pertumbuhan (ADHK)					
a. Bangunan (%)	7.55	6.36	7.69	3.35	7.28
b. Non Bangunan (%)	10.71	13.41	3.65	7.81	(11.92)
c. Total PMTB (%)	8.50	8.52	6.40	4.74	1.11

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

3.2.5. Perubahan Inventori

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “persediaan” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

**Tabel 3.12 Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori
Kabupaten Kepulauan Sula 2014-2018**
**Table 3.12 Trend and Structure of Changes in Inventories, Kepulauan Sula
2014-2018**

Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Inventori					
a. ADHB (Miliar Rp)	(38.72)	100.46	(14.48)	(30.88)	69.17
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	(32.31)	100.32	(10.48)	(14.35)	31.17
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	-2.41	5.60	-0.74	-1.46	3.02

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis lebih rinci, perubahan inventori hanya dapat dianalisis dari sisi proporsi dalam publikasi ini. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih jauh sebagaimana dilakukan pada komponen pengeluaran lainnya.

Pada tahun 2014, Perubahan Inventori atas dasar harga berlaku sebesar negatif 38,72 miliar rupiah, yang kemudian meningkat pada tahun 2015 sebesar 100,46 miliar rupiah. Namun perubahan Inventori kembali mengalami penurunan sebesar negatif 14,48 miliar rupiah pada tahun 2016. Pada tahun 2018, perubahan inventori mencapai 69,17 miliar rupiah.

Sementara itu, proporsi perubahan inventori terhadap total PDRB di Kabupaten Kepulauan Sula mengalami fluktuasi. Pada tahun 2014, proporsi perubahan inventori adalah negatif 2,41 persen (2014), 5,60 persen (2015), negatif 0,74 persen (2016), negatif 1,46 persen pada tahun 2017, dan 3,02 persen pada tahun 2018.

3.2.6. Ekspor Barang dan Jasa

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi Kabupaten Kepulauan Sula, tetapi dikonsumsi oleh pihak yang berdomisili di wilayah lain, baik itu kabupaten lain di dalam satu propinsi, propinsi lain, maupun luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah ke dalam wilayah domestik dan sebagainya.

Tabel 3.13 Perkembangan Ekspor Kabupaten/Kota Kepulauan Sula 2014-2018
Table 3.13 Trend of Export, Kepulauan Sula 2014-2018

Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ekspor					
a. ADHB (Miliar Rp)	1,154.34	1,244.06	1,682.33	1,678.80	1,878.78
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	1,033.84	1,112.40	1,216.32	1,309.82	1,397.83
Pertumbuhan Ekspor	87.96	7.60	9.34	7.69	6.72
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	71.75	69.40	86.35	79.22	82.04

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Secara total, dalam kurun waktu 2014-2018 nilai ekspor barang dan jasa menunjukkan peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2014, nilai ekspor barang dan jasa sebesar 1,15 triliun rupiah meningkat menjadi sebesar 1,24 triliun rupiah pada tahun 2015. Selanjutnya pada tahun 2016-2018 nilai ekspor barang dan jasa sebesar 1,68 triliun rupiah; 1,68 triliun rupiah; dan 1,88 triliun rupiah. Berbeda dengan nilai ekspor atas dasar harga Berlaku, nilai ekspor barang dan jasa atas dasar harga konstan 2010 menunjukkan arah pertumbuhan yang berbeda, yaitu cenderung menurun dalam tiga tahun terakhir dengan nilai "riil" masing-masing tahun sebesar 1,03 triliun rupiah (2014); 1,11 triliun rupiah (2015); 1,22 triliun rupiah (2016); dan 1,31 triliun rupiah (2017), dan 1,39 persen di tahun 2018. Sementara itu, pada periode 2013 s.d 2017, proporsi dalam PDRB justru cenderung berfluktuatif namun pada tahun 2018, proporsi ekspor meningkat menjadi 82,04 .

Pertumbuhan riil total ekspor mencapai angka yang tinggi, khususnya pada tahun 2016 dengan mencapai 9,34 persen. Pertumbuhan yang tinggi tersebut disebabkan tingginya produksi hasil perkebunan tahunan seperti cengkeh, kakao, dan jambu mete. Sedangkan pada tahun 2017, pertumbuhan ekspor mengalami penurunan menjadi sebesar 7,69 persen. Pertumbuhan ekspor kembali melambat di tahun 2018 yakni menjadi sebesar 6,72 persen. Faktor yang mungkin dapat

menjadi penyebab utama lambatnya pertumbuhan ekspor adalah menurunnya produksi perkebunan tahunan pada tahun tersebut, mengingat produk yang mendominasi ekspor Kepulauan Sula adalah produk pertanian, kehutanan, dan perikanan yang salah satu sub kategorinya adalah perkebunan tahunan.

3.2.7. Impor Barang dan Jasa

Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor, didalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik Kabupaten Kepulauan Sula Sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan yaitu dengan cara mengurangi nilai PDRB (E) dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (sektor).

Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongan-nya bisa berbeda dengan ekspor. Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk (*resident*) Kabupaten Kepulauan Sula di luar domestik, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa). Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor barang dan jasa dapat menunjukkan seberapa besar ketergantungan Kabupaten Kepulauan Sula terhadap ekonomi atau produk wilayah lain, baik wilayah kabupaten/kota lain dalam satu propinsi, propinsi lain, maupun luar negeri.

Data pada tabel di bawah ini menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2014-2018, secara total nilai impor barang dan jasa Kabupaten Kepulauan Sula atas dasar harga berlaku sedikit fluktuatif

namun cenderung meningkat. Akan tetapi jika dinilai berdasarkan harga konstan, terjadi peningkatan total impor dalam 3 tahun terakhir. Pada tahun 2014, nilai impor barang dan jasa atas dasar harga berlaku mencapai 1,19 triliun rupiah, kemudian meningkat di tahun 2015 menjadi 1,42 triliun rupiah dan meningkat kembali menjadi 1,66 triliun rupiah pada tahun 2018.

Demikian juga dengan proporsinya, terjadi fluktuasi pada proporsi impor terhadap PDRB Kepulauan Sula selama tahun 2014 hingga 2018. Pada tahun 2014, impor barang dan jasa memberikan kontribusi sebesar 77,56 persen. Pada 2 tahun berikutnya kontribusi impor barang dan jasa meningkat menjadi 82,35 persen dan 93,06 persen. Selanjutnya, pada tahun 2017-2018, proporsi impor barang dan jasa masing-masing menjadi 84,62 persen dan 94,15 persen.

Tingginya proporsi impor tersebut menjadi penyebab rendahnya net ekspor Kabupaten Kepulauan Sula. Hal ini sejalan dengan kondisi perekonomian Kabupaten Kepulauan Sula dimana seluruh barang dan jasa baik merupakan hasil dari sektor primer maupun sekunder belum mampu memenuhi kebutuhan penduduk Kepulauan Sula secara umum. Berbagai spekulasi muncul dalam permasalahan ini meskipun permasalahan rendahnya net ekspor merupakan hal yang umum terjadi di berbagai wilayah utamanya di wilayah timur Indonesia yang belum memiliki input baik bahan baku, kapital, maupun sumber daya manusia yang berkualitas dalam menghasilkan suatu produk.

Tabel 3.14 Perkembangan Impor Kabupaten Kepulauan Sula 2014-2018
Table 3.13 Trend of Import, Kepulauan Sula 2013 – 2017

Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Impor					
a. ADHB (Miliar Rp)	1.264,33	1.247,80	1.476,07	1.420,90	1.402,04
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	630,27	1.194,24	1.421,36	1.334,96	1.302,08
Pertumbuhan Impor	8,36	16,69	30,36	14,99	15,67
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	32,05	30,40	31,11	29,66	28,47

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

IV BAB IV

**PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB PENGELUARAN
KABUPATEN KEPULAUAN SULA**

2014 - 2018

<https://kepsulkab.sps.go.id>

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

4.1 PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam wilayah ekonomi Kabupaten Kepulauan Sula di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran "produktivitas", karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, dapat dilihat dari data PDRB perkapita

Tabel 4.1 Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Kepulauan Sula 2013 – 2017
Table 4.1 Gross Domestic Regional Bruto and per capita GRDP, Region kepulauan Sula 2014-2018

Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB Perkapita					
a. ADHB (Miliar Rp)	17.22	18.81	20.05	21.36	22.68
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	13.42	13.94	14.36	14.77	15.28
Pertumbuhan PDRB Perkapita (%)	3.82	3.82	3.06	2.81	3.49
Jumlah penduduk	93435	95285	97177	99196	100967

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

4.2 PROPORSI PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Tabel 4.2 Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Sula 2014-2018

Table 4.2 Total Proporsion of Final Consumption Expenditure to GRDP Kepulauan Sula 2013 – 2017

Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB)					
a. Rumah Tangga (Miliar Rp)	888.90	975.06	1,081.70	1,174.73	1,283.38
b. LNPRT (Miliar Rp)	8.74	9.66	10.57	11.73	13.99
c. Pemerintah (Miliar Rp)	399.51	443.45	465.19	502.03	585.28
Jumlah Konsumsi Akhir (Miliar Rp)	1297.15	1428.18	1557.46	1688.49	1882.65
PDRB (ADHB) (Miliar Rp)	1,608.75	1,792.56	1,948.34	2,119.25	2,290.11
Proporsi (%)	80.63	79.67	79.94	79.67	82.21

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Berdasarkan Tabel 4.2, terlihat bahwa konsumsi akhir setiap institusi selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dalam kurun waktu 2014 – 2018, konsumsi rumah tangga terus menjadi penyumbang utama dalam konsumsi akhir total PDRB Kepulauan Sula. Pada tahun 2014, konsumsi rumah tangga di Kepulauan Sula adalah 888,98 miliar rupiah namun meningkat signifikan menjadi 1,28 triliun rupiah pada tahun 2018. Sementara itu, konsumsi pemerintah menempati posisi kedua dalam hal sumbangan terhadap total konsumsi akhir PDRB Sula 2018. Pada tahun 2014,

konsumsi pemerintah sebesar 399,51 miliar rupiah, akan tetapi pada tahun 2018 nilai tersebut meningkat menjadi 585,28 miliar rupiah. Disisi lain, Konsumsi LNPRT juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun meskipun proporsinya tidak begitu besar (Lihat Tabel 4.2). Pada tahun 2018, total konsumsi LNPRT adalah sebesar 11,55 miliar rupiah. Nilai tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2016 dengan total konsumsi LNPRT 13,99 miliar rupiah.

Adapun proporsi dari konsumsi akhir terus berfluktuatif dan cenderung menunjukkan penurunan. Pada tahun 2014, proporsi konsumsi akhir terhadap total PDRB adalah 80,63 persen. Secara perlahan, angka tersebut mengalami penurunan menjadi 79,67 di tahun 2015. Pada tahun 2016, proporsi konsumsi akhir kembali meningkat ke level 79,94 persen namun kembali menunjukkan penurunan di tahun 2017 menjadi 79,67 persen dan kemudian meningkat menjadi 82,21 persen di tahun 2018. Adanya kecenderungan proporsi konsumsi akhir untuk menurun menunjukkan bahwa total PDRB perlahan mulai diperkuat oleh komponen lain seperti investasi yang dalam hal ini ialah PMTB.

4.3 INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR)

"ICOR" merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran).

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter "Nilai Tambah".

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit. Formula :

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

Di mana: I_t = PMTB tahun ke t

Y_t = Output tahun ke t

Y_{t-1} = Output tahun ke t-1

Tabel 4.3 Incremental Capital Output Ratio, Kabupaten Kepulauan Sula 2014-2018

Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHK 2010) (Miliar Rp)	1,254.12	1,327.81	1,395.65	1,464.73	1,542.90
Perubahan (Miliar Rp)	-	73.69	67.84	69.08	78.17
PMTB (ADHK 2010) (Miliar Rp)	389.42	422.61	449.65	470.96	476.19
ICOR	-	5.74	6.63	6.82	6.09

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Berdasarkan Tabel 24, dapat dilihat bahwa nilai ICOR meningkat dari tahun ke tahun selama kurun waktu 2014 – 2018. Pada tahun 2014, ICOR Kepulauan Sula adalah sebesar 5,74. Artinya untuk menambah 1 unit output diperlukan investasi sebesar 5 unit. Pada tahun 2018, ICOR Kepulauan Sula adalah sebesar 6,09. Hal ini menunjukkan adanya perubahan tambahan kapital yang diperlukan untuk menghasilkan 1 unit output. Untuk menambah 1 unit output di tahun 2018, diperlukan 6 unit investasi.

<https://kepsulkab.bps.go.id>

<https://kepsulkab.bps.go.id>

V BAB V

Penutup

<https://kepsulkab.bps.go.id>

1. akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk, rumah tangga, dan pegawai negeri), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Data dapat disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2014 s.d 2018, sehingga mudah di dalam menggambarkan perubahan PDRB menurut pengeluaran tahun 2014 s.d 2018 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kabupaten Kepulauan Sula pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan atau kecenderungan yang terjadi antara waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana (NAD).
5. Sebagian data tentang interaksi dengan luar daerah (*external account*) secara agregat disajikan

di sini, seperti ekspor dan impor. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Kabupaten Kepulauan Sula terhadap ekonomi luar daerah.

<https://kepsulkab.bps.go.id>

LAMPIRAN

<https://kepsulkab.bps.go.id>

Tabel 1. PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2014-2018

KOMPONEN	2014	2015	2016	2017*	2018**
1. Konsumsi Rumah Tangga	888.90	975.06	1,081.70	1,174.73	1,283.38
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	8.74	9.66	10.57	11.73	13.99
3. Konsumsi Pemerintah	399.51	443.45	465.19	502.03	585.28
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	443.78	495.94	536.11	576.13	615.64
5. Perubahan Inventori	(38.72)	100.46	(14.48)	(30.88)	69.17
6. Ekspor	1,154.34	1,244.06	1,682.33	1,678.80	1,878.78
7. Impor	1,247.80	1,476.09	1,813.06	1,793.28	2,156.12
PDRB	1.416,12	1.608,75	1.792,57	1.948,34	2.120,36

Tabel 2. PDRB ADHK Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2014-2018

KOMPONEN	2014	2015	2016	2017*	2018**
1. Konsumsi Rumah Tangga	736.93	770.46	809.22	849.44	889.91
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	7.45	7.75	8.16	8.59	9.89
3. Konsumsi Pemerintah	313.03	335.64	341.51	356.97	396.20
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	389.42	422.61	449.65	470.96	476.19
5. Perubahan Inventori	(32.31)	100.32	(10.48)	(14.35)	31.17
6. Ekspor	1,033.84	1,112.40	1,216.32	1,309.82	1,397.83
7. Impor	1,194.24	1,421.37	1,418.73	1,516.69	1,658.30
PDRB	1,254.12	1,327.81	1,395.65	1,464.73	1,542.90

Tabel 3. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2014-2018

KOMPONEN	2014	2015	2016	2017*	2018**
1. Konsumsi Rumah Tangga	5.13	4.55	5.03	4.97	4.76
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	8.38	4.02	5.34	5.27	15.15
3. Konsumsi Pemerintah	7.90	7.22	1.75	4.53	10.99
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	8.50	8.52	6.40	4.74	1.11
5. Perubahan Inventori	65.95	410.55	-110.45	-36.89	317.24
6. Ekspor	87.96	7.60	9.34	7.69	6.72
7. Impor	89.48	19.02	-0.19	6.91	9.34
	6,05	6,13	5,88	5,11	5,00

Tabel 4. Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2014-2018

KOMPONEN	2013	2014	2015	2016	2017
1. Konsumsi Rumah Tangga	114,84	120,62	126,56	131,93	137,46
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	109,65	117,44	124,78	130,90	136,09
3. Konsumsi Pemerintah	120,09	127,62	132,12	136,88	139,73
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	108,94	113,96	117,35	119,17	122,90
5. Perubahan Inventori	- 69,16	119,86	100,14	138,17	231,94
6. Ekspor	193,25	111,66	111,84	114,60	118,41
7. Impor	200,60	104,48	103,85	106,44	107,68
PDRB	119,84	128,28	135,00	139,60	144,69

Tabel 5. Laju Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2014-2018

KOMPONEN	2013	2014	2015	2016	2017
1. Konsumsi Rumah Tangga	6,24	5,03	4,92	4,25	4,19
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	3,44	7,10	6,26	4,90	3,97
3. Konsumsi Pemerintah	6,23	6,27	3,53	3,60	2,09
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	0,39	4,61	2,98	1,55	3,13
5. Perubahan Inventori	- 219,62	273,31	- 16,45	37,97	67,87
6. Ekspor	74,22	- 42,22	0,16	2,47	3,32
7. Impor	106,21	- 47,91	- 0,61	2,49	1,16
PDRB	5,50	7,04	5,24	3,41	3,65

Tabel 6. Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2014-2018

KOMPONEN	2013	2014	2015	2016	2017
1. Konsumsi Rumah Tangga	58.76	58.02	57.98	57.99	57.68
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	0.59	0.58	0.58	0.59	0.64
3. Konsumsi Pemerintah	24.96	25.28	24.47	24.37	25.68
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	31.05	31.83	32.22	32.15	30.86
5. Perubahan Inventori	-2.58	7.56	-0.75	-0.98	2.02
6. Ekspor	82.44	83.78	87.15	89.42	90.60
7. Impor	95.23	107.05	101.65	103.55	107.48
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

DAFTAR PUSTAKA

<https://kepsulkab.bps.go.id/>

1. Badan Pusat Statistik, *Tabel Input Output Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
2. _____, *Pendapatan Nasional Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
3. _____, *Statistik Matriks Investasi Pemerintah Pusat*, berbagai seri, Jakarta.
4. _____, *Profil Ekonomi Rumah tangga 1998*, Jakarta 1999.
5. Frenken Jim, *How To Measure Tangible Capital Stocks*, Netherlands, 1992.
6. Host Poul, Madsen, *Macroeconomic Accounts An Overview*, Pamphlet Series, No. 29, Washington DC, 1979.
7. Keuning. J. Steven, *An Estimate of the Fixed Capital Stock By Industry and Types of Capital Goods in Indonesia*, Statistical Analysis Capability Program, Project Working Paper, Series No.4, Jakarta 1988.
8. _____, *Input-Output Table and Analysis*, Studies in Methods, Series F No. 14 Rev 1, New York, 1973.
9. _____, *Handbook of National Accounting for Production*, Sources and Methods, Series F No. 39, New York, 1986.
10. Verbiest Piet, *Investment Matrix*, Hasil Kerjasama Asian Development Bank dengan Badan Pusat Statistik, Jakarta, 1997.
11. Ward, Michael, *The Measurement of Capital: Methodology of Capital Stock Estimates in OECD Countries*, Paris, 1976.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://kepsulkab.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KEPULAUAN SULA**

Jln. Yos Sudarso KM. 10, Desa Pohea,
Kec. Sanana Utara, Kepulauan Sula,
Maluku Utara, 97795

 kepsulkab.bps.go.id  bps8203@bps.go.id